

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Febriansyah (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se- Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara*.
- Albehadili, A.F.C., & Hai, L.X. (2018). Impact of Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Meta-Analysis Approach. *International Journal of Management Science and Bussiness Administration* Vol 4, Issue 5, Pages 34-43.
- Alfarisi, Salman. (2015) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat). Universitas Negeri Padang. Jurnal. Universitas Negeri Padang
- Andirfa, Mulia., Basri, Hasan., & Majid, M. S. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/ Kota di Propinsi Aceh. Jurnal. Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Antari, Ni Putu G S (2018). Pengaruh PAD dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Journal Unud, Vol 7. No. 2*
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM. (1991). Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah.
- Bartle, J.R., Kriz, KA., & Morozov, B. (2011). Local Government Revenue Structure. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 23 (2) 268-287.
- Bastian, Indra. (2001) Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Budianto & Alexander S.W. (2016). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA Vol.4 No.4*
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*. 16: 49-64

- Ebel, Robert., & Yilmaz, Serdar. (2004). *Globalization and Localization: Decentralization Trends and Outcomes*. Intergovernmental Relations & Local Financial Management World Bank 2004.
- Febriansyah, A. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se- Sumatera Bagian Selatan.
- Fontanella, A. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Paper Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habibi, Muhammad. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Th. 28, No.2.
- Inyang, B (2014). Contending Issue in The Management of the Intergovernmental Relations in The Nigeria Federal Administration System. *Mediterranean Journal of Social Science*. 4 (3). 226-233.
- Jauhar, Fauzan (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat.
- Julitawati, Darwanis, dan Jalaludin (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Propinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Vol 1. No 1. Hal 1-12.
- Liu, C.H (2007). What Type of Fiscal Decentralization System has Better Performance. *School of Public Policy*.
- Malendra, T.F., Meihendri., & Yunilma (2016). Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. *Ejurnal Universitas Bung Hatta* Vol 9 No 1.
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Maulani, A. (2010, November 25). Korupsi dan Wajah Kusam Otonomi Daerah. *Koran Tempo*.

- Mawarni (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten/ Kota di Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 80-90.
- Mawarni, Darwanis, dan Syukriy Abdullah (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol2 No2 Hal 80-90.
- Mimba, N.S.H., Helden, G.J.V & Tillema, Sandra. (2007). Public Sector Performance Measurement in Developing Countries. *Journal of Accounting and Organizational Change* Vol3. No3p.192-198.
- Moisiu, N. (2007). Decentralization and The Increased Autonomy in Local Government. *Procedia Social and Behavioral Science*.
- Mulyani, Sri., & Wibowo, Hardianto. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *KOMPARTEMEN*, Vol XV No 1 hal 57-66.
- Mulyati, Sri. (2017). Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 1. No 2. Hal 211-220.
- Nazaruddin, Itje dan Basuki, AT. (2015). Analisis Statistik dengan SPSS. Yogyakarta: Danisa Media.
- Nugroho, Fajar., & Rohman, Abdul. (2012). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting* Vol 1 No 2 Hal 1-14.
- Pratolo, Suryo., dan Jatmiko, Bambang. (2017). Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta. Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. (2001) *Ekonomika Publik*, BPFE, Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan APBD.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Pasal 27 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Sakir. (2015). Kebijakan Dana Kestimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, Vol 2, No 3.*
- Sasana H. (2009). Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/ Kota Propinsi Jawa tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan.*
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Supriadi., Armandelis., & Rahadi, Slamet. (2013). Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 1 No. 1 Hal 1-10.
- Suprianto. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Propinsi Gorontalo. *Jurnal Universitas Negeri Gorontalo.*
- Vazquez, J.M., Penaz, S.L., & Sacchi, A. (2015). The Impact of Fiscal Decentralization. *GEN Working Paper A -2015.*
- World Bank (1994). Governance: The World Bank's Experience
- Yuguda, M.A. (2014). Effect of Fiscal Decentralization and Revenue Allocation on Local Government Performance: The Nigerian Experience. *JGD* Vol. 10 page 55-68.

